

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
FUNDAMENTAL LANJUTAN TAHUN KE II (DUA)
TAHUN ANGGARAN 2010**



JUDUL PENELITIAN

**KAJIAN KOMPREHENSIF UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA (UPKD)
DAN PROBABILITAS KEGAGALAN DALAM PENGELOLAANNYA
PASCA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (BRDP)
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

PENELITI

**Ir. NUSRIL, MM
INDRA CAHYADINATA, SP, M.Si
Ir. BAMBANG SUMANTRI, MS**

**DIBIYAI OLEH DIPA UNIVERSITAS BENGKULU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 2235/H30.10.06.01/HK/2010 Tanggal 23 Maret 2010**


**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2010**

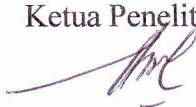
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL


1. Judul Penelitian : Kajian Komprehensif Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) - dan Probabilitas Kegagalan dalam Pengelolaannya Pasca Bengkulu Regional Development Project (BRDP) di Kabupaten Bengkulu Utara
2. Ketua Peneliti :
a. Nama lengkap : Ir. Nusril, MM
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 19581211 198603 1 002
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural : -
f. Bidang Keahlian : Agribisnis
g. Fakultas/Jurusan : Pertanian / Sosial Ekonomi Pertanian
h. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
i. Anggota Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Jurusan / Fakultas
1	Indra Cahyadinata, SP. MSi	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosek / Pertanian
2	Bambang Sumantri, Ir, MS	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosek / Pertanian

4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu
5. Kerjasama dengan Instansi Lain :
a. Nama Instansi : -
b. Alamat : -
6. Masa Penelitian : 26 Maret 2010 - 26 Oktober 2010
7. Biaya : Rp 32.000.000 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*)

Mengetahui
Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Yuwana, M.Sc
NIP. 19591210 198603 1 003

Bengkulu, Oktober 2010
Ketua Peneliti

Ir. Nusril, MM
NIP. 19581211 198603 1 002

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum
NIP. 19581112 198603 1 002

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan tujuan untuk : (1) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pengelolaan UPKD pasca proyek BRDP, dan (2) Kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD. Untuk mencapai tujuan tersebut, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan pendekatan Probit Binary untuk mengkaji probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD pasca BRDP.

Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama, 13 (tiga belas) variabel bebas yang terdiri dari umur, pendidikan kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan rumah tangga, lama menjadi nasabah, jumlah pinjaman, persepsi terhadap dana bergulir, persepsi terhadap pengurus dan pelaksanaan kegiatan UPKD, tingkat partisipasi dalam pertemuan, aspek organisasi UPKD, aspek pengelolaan UPKD dan aspek administrasi UPKD berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD. Secara parsial, hanya ada tiga variabel yang berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD, yaitu 1) lama menjadi nasabah berpengaruh nyata positif dengan nilai efek marginal sebesar 0.082, berarti setiap peningkatan lamanya responden menjadi nasabah UPKD selama satu tahun maka akan meningkatkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD sebesar 0.082, 2) aspek organisasi UPKD berpengaruh nyata negatif dengan nilai efek marginal sebesar -0.013, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek organisasi sebesar satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.013, dan 3) variabel aspek administrasi keuangan berpengaruh nyata negatif dengan nilai efek marginal sebesar -0.047, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek administrasi keuangan UPKD sebesar satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.047.

DAFTAR ISI

	Hal
Ringkasan	i
Prakata	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Kajian Pustaka	5
2.1. Gambaran Umum BRDP	5
2.2. Gambaran Umum UPKD	9
Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
3.1. Tujuan	12
3.2. Manfaat Penelitian	12
Bab IV. Metode Penelitian	14
4.1. Penentuan Lokasi Penelitian	14
4.2. Sampling	14
4.3. Metode Analisa Data	15
Bab V. Hasil dan Pembahasan	18
5.1. Hasil	18
5.2. Pembahasan	20
Bab VI. Simpulan dan Saran	38
6.1. Simpulan	38
6.2. Saran	39
Daftar Pustaka	40
Lampiran	41

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini berbagai program dilaksanakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sebagai upaya meningkatkan perekonomian pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program *Bengkulu Regional Development Project* (BRDP). BRDP dimulai pada tahun 1998 yang didanai dari pinjaman IBRD-Loan 4290-IND. Pada awalnya kegiatan BRDP hanya dilaksanakan di 220 desa yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu. Pada tahun 2004 berkembang menjadi 350 desa binaan yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu. Desa-desa yang dibina seluruhnya merupakan desa yang termasuk dalam kriteria desa miskin. Perencanaan kegiatan BRDP didasarkan atas partisipasi masyarakat, oleh karena itu program ini disusun dengan mengakomodasikan kebutuhan dan permintaan masyarakat sasaran (*demand driven*). Metode ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga keberlangsungan program dapat terjamin, dengan kata lain, manfaat dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh setelah program BRDP selesai.

Secara garis besar Program kegiatan BRDP mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana desa (*Village Infrastructure Componen/VIC*), adopsi teknologi pertanian pedesaan (*Village Based Technology Adoption/VBAT*), serta kegiatan usaha ekonomi produktif (*Income generating activity*). Komponen-komponen kegiatan BRDP di tingkat desa selanjutnya disebut dengan Program Kegiatan Desa (PKD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD). UPKD bertindak sebagai pengelola keuangan desa yang berperan paling penting dalam memberi bantuan pembiayaan bagi kegiatan desa, terutama yang menyangkut pengembangan ekonomi produktif pedesaan.

Kegiatan UPKD yang telah berjalan sekitar sembilan tahun tentunya telah mendatangkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak ini dapat dilihat dari

adanya perubahan dalam pengetahuan kewirausahaan, perubahan dalam nilai masyarakat, perubahan dalam pengambilan keputusan, perubahan dalam pemanfaatan teknologi, perubahan dalam kualitas lingkungan hidup, perubahan dalam penyerapan tenaga kerja dan perubahan dalam partisipasi masyarakat. Seluruh perubahan ini terjadi sebagai akibat adanya investasi yang ditanamkan di pedesaan melalui proyek BRDP.

UPKD selama masa BRDP telah mengalami perkembangan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pengembalian anggota yang setiap bulannya mencapai 87,5 %. Angka ini juga menggambarkan tingkat partisipasi anggota dalam berusaha untuk mempertahankan keberadaan UPKD sebagai salah satu sumber modal di pedesaan. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang memiliki lebih banyak UPKD di bandingkan dengan Kabupaten lainnya di dalam Propinsi Bengkulu. Data selengkapnya tentang penyebaran UPKD di Propinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penyebaran Jumlah UPKD dan Anggota di Setiap Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu Pada Masa BRDP

Kabupaten	Jumlah			
	UPKD (Unit)	Nasabah (orang)		
		Laki	Wanita	Jumlah
Bengkulu Utara	108	17.819	6.523	24.352
Mukomuko	25	6.244	1.883	8.127
Lebong	28	4.550	1.771	6.321
Kepahiang	33	7.765	3.014	10.779
Rejang Lebong	53	9.397	3.762	13.159
Bengkulu Selatan	38	4.181	856	5.037
Seluma	43	8.610	1.764	10.374
Kaur	42	4.874	1.121	5.995
Total	370	63.440	20.704	84.144

Keadaan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara jika ditinjau dari tingkat kesehatan keuangan, partisipasi masyarakat serta tingkat pendapatan anggotanya sangat beragam. Keragaman ini dapat mengindikasikan tingkat kesehatan UPKD yang bersangkutan. Oleh karena itu, keadaan kesehatan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibagi menjadi 3 kondisi yaitu *sangat sehat, sehat dan tidak sehat*. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa 66 % keadaan keuangan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara selama masa BRDP termasuk dalam katagori sehat sedangkan sisanya yaitu 34 % dalam tidak sehat, 23 % sangat tidak sehat.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Kesehatan per Kabupaten

Kabupaten	Tingkat Kesehatan							Jumlah	% Sehat
	SEHAT			TIDAK SEHAT					
	Sgt Sehat	Sehat		Kurang Sehat		Tidak Sehat	Sgt Tdk Sehat		
	95 - 100	90 - <95	80 - <90	70 - <80	60 - <70	50 - <60	<50		
Bengkulu Utara	52	7	12	6	8	4	19	108	66%
Muko-Muko	12	1	4	1	1	2	4	25	68%
Seluma	13	4	6	2	3	1	14	43	53%
Bengkulu Selatan	13	3	2	0	2	2	16	38	47%
Kaur	13	1	6	0	3	6	13	42	48%
Kepahiang	6	7	10	4	1	2	2	32	72%
Rejang Lebong	30	5	13	1	1	0	1	51	94%
Lebong	1	0	1	3	3	8	14	30	7%

Tingkat kesehatan UPKD ini juga ternyata dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dari masyarakat setempat. Kondisi finansial UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara pada masa BRDP memang sangat beragam antara UPKD yang satu dengan yang lain, namun secara rata-rata menunjukkan kondisi finansial relatif baik. Hal ini dapat dilihat beberapa ratio keuangan UPKD tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa ratio keuangan UPKD di lihat dari sisi likuiditasnya menunjukkan angka lebih

besar dari 1. Hal ini berarti UPKD memiliki kemampuan membayar kewajibannya dalam jangka pendek yang sangat baik. Kondisi yang baik ini tidak terlepas dari peranan manajemen BRDP yang selalu melakukan pembinaan secara kontinyu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kondisi ini tetap dapat dipertahankan *setelah masa BRDP (pasca proyek)*, mengingat banyak fasilitas dari BRDP tidak diperoleh UPKD lagi.

Penggambaran kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi selama masa proyek BRDP, dimana semua UPKD memperoleh pembinaan dan pendampingan baik secara kelembagaan maupun pengurus/anggota lembaga. Setelah masa BRDP (setelah 31 Agustus 2005), UPKD telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten. Kabupaten memiliki anggaran yang terbatas untuk dapat mempertahankan sistem BRDP dalam melakukan pembinaan terhadap UPKD. *Salah satu contoh*, pada masa BRDP, setiap UPKD mendapatkan petugas fasilitator yang berfungsi membantu pengurus dalam menjalankan kegiatan UPKD sehari-hari dari administrasi sampai kegiatan teknis di lapangan, namun fasilitas ini sekarang sudah tidak ada lagi. *Contoh yang lain* adalah, pada masa BRDP seluruh permodalan UPKD dibantu seluruhnya dari proyek, namun hal ini tidak terjadi sekarang.

Sekarang, UPKD harus dapat memupuk modal sendiri dari modal yang diberikan BRDP. Artinya, UPKD harus dapat mempertahankan tingkat pengembalian anggota setinggi mungkin agar modal yang tertanam dapat terus diputar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini berarti kondisi finansial UPKD harus tetap dipertahankan kesehatannya. Untuk itu, menjadi menarik faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pengelolaan UPKD dan kontribusi setiap faktor terhadap probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum BRDP

Pelaksanaan Bengkulu Regional Development Project (BRDP) pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Propinsi Bengkulu melalui pembangunan pedesaan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi; dan mendukung kelestarian lingkungan hidup. Atas dasar tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan sasaran yang akan dicapai melalui BRDP ini adalah terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif; berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan; dan meningkatnya daya beli masyarakat melalui kegiatan peningkatan pendapatan.

Desa-desasasaran penerima program yang dipilih didasarkan pada beberapa kriteria antara lain desa-desa tersebut berlokasi di tiga kabupaten (sebelum pemekaran), yakni kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan (sekarang menjadi 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) ; desa-desa miskin berdasarkan klasifikasi perkembangan desa di Propinsi Bengkulu; desa-desa yang bersifat klaster atau berdekatan; dan desa-desa yang tidak termasuk sasaran *Tree Crops Small Scale Project (TCSSP)* dan *Kerinci Seblat Integrated Conservation Development Project (ICDP)*.

Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dilaksanakan atas dukungan dana pinjaman dari IBRD-Loan 4290-IND yang dimulai pada tahun 1998 dan berakhir pada 31 Desember 2005. Kegiatan Program BRDP, dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I, II, dan III, pada desa sasaran lama yang berjumlah 220 desa, serta tahap IV dan V pada desa-desa sasaran yang baru sebanyak 150 desa (sesuai dengan Loan Amandement 19 Februari 2004).

Pada tahap awal, atau yang lebih dikenal dengan desain awal, BRDP terdiri dari tiga komponen proyek, yaitu :

Bagian A : *Village Infrastructure* (Pembangunan Infrastruktur Desa), berupa pembangunan sarana dan prasarana publik untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif. Tidak semua desa binaan BRDP melaksanakan pembangunan sarana/prasarana desa (Infrasruktur). Sarana/prasarana yang telah dibangun dari dana BRDP meliputi berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa seperti jalan desa/usahatani, jembatan, gorong-gorong, perbaikan/sarana pelengkap irigasi, pasar desa, kios pasar, TPI (tempat pelelangan ikan), fasilitas air bersih dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan adopsi teknologi pertanian dan usaha ekonomi produktif, pembangunan dan rehabilitasi jalan usahatani desa lebih ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar transportasi hasil usahatani.

Kegiatan pembangunan sarana/prasarana desa dilakukan dengan pola padat karya dan dengan menggunakan tenaga kerja lokal. Namun bila tidak tersedia tenaga kerja terampil yang diperlukan maka berdasarkan musyawarah desa dapat dipekerjakan tenaga terampil dari luar desa yang bersangkutan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana /prasarana desa pendukung program peningkatan ekonomi dilakukan jika masyarakat bersedia memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk modal, misalnya lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan lain serta pernyataan kesanggupan untuk memelihara fasilitas tersebut yang dituangkan dalam perjanjian rencana pengelolaan dan pemeliharaan. Pola dan ketentuan ini terlaksana dengan baik.

Bagian B : *Village-Based Technology Adoption* (Adopsi Teknologi), berupa 1) investasi proyek untuk uji seleksi teknologi pertanian; 2) penguatan kapasitas LKMD untuk uji dan replikasi teknologi terpilih, dan aplikasi teknologi pertanian melalui pelatihan lapangan oleh penyuluh; 3) peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk tanaman tahunan melalui pengadaan peralatan, bahan baku dan pelatihan; 4) peningkatan produksi benih tanaman tahunan oleh petani melalui bimbingan teknis oleh dinas kabupaten untuk tanaman pangan serta pengadaan peralatan dan bahan baku; 5) penguatan kapasitas BIPP dan; 6) penguatan implementasi proyek melalui peningkatan kapasitas staf di kabupaten penerima

melalui pengadaan peralatan kantor, furnitur, dan kendaraan oleh BAPPEDA dan Workshop.

Bagian C : *Capacity Building and Implementation Support* (Pengembangan Kapasitas dan Pendukung Implementasi), berupa 1) penguatan kelembagaan desa dalam hal teknis, finansial dan administrasi serta tim implementasi desa melalui kegiatan pelayanan, dukungan teknis kepada kelembagaan desa dalam disain dan konstruksi infrastruktur desa oleh tenaga lapangan; 2) identifikasi paket uji teknologi pertanian yang relevan, penyiapan peranan BPP dan Penyuluh Pertanian untuk masing-masing paket teknologi, monitoring, dan analisis terhadap uji teknologi yang dilakukan oleh IPTP; 3) penguatan implementasi proyek melalui konstruksi ruang BAPPEDA propinsi; asistensi teknis; serta workshop, supervisi proyek, monitoring dan evaluasi; 4) penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk identifikasi, penyiapan rencana aksi untuk pengajuan sub serta implementasi sub proyek yang diusulkan melalui pengadaan pelayanan oleh fasilitator pengembangan masyarakat; 5) desiminasi konsep informasi pemda propinsi dan prosedur untuk implementasi bagi desa binaan dan lembaga keuangan termasuk pengadaan peralatan kantor, furnitur dan peralatan untuk pemda propinsi; dan 6) melaksanakan survei proyek yang bermanfaat di desa binaan.

Pada desain awal, proyek lebih difokuskan pada uji seleksi teknologi pertanian. Proyek di disain untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga petani dengan merancang petani pioneer. Petani pioneer tersebut dibantu dalam usahataniya baik tanaman pangan atau perkebunan guna meningkatkan kemampuan dalam berusahatani. Program petani pioneer ini hanya ada pada Tahap I dan II, pada Tahap III (tahun 2001), sistem petani pioneer ini tidak berlaku lagi. Komoditi pilihan dan calon petani pioneer dipilih berdasarkan musyawarah desa. Pada sistem petani pioneer, pihak BRDP memberikan bantuan sarana produksi senilai Rp. 7.500.000,- per kelompok petani (*terdiri dari 5 orang, sehingga satu petani pioneer mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 ,satu juta lima ratus ribu rupiah*). Berbagai jenis usahatani pioneer yang disepakati antara manajemen proyek BRDP dengan masyarakat desa adalah

usahatani karet, mina padi, kopi, durian, kelapa sawit dan jagung. Namun, petani pioneer yang berhasil dalam usahanya sangat kecil (kurang dari 5%). Oleh karena itu, disain petani pioneer tidak cocok diterapkan. Dalam hal ini, kegagalan petani pioneer adalah tingginya resiko kegagalan usahatani dan ketidakpastian musim sepanjang tahun sehingga panen sering kali gagal. Kegagalan ini mengakibatkan terhentinya perputaran dana, sehingga petani yang lain tidak memperoleh kesempatan untuk dapat merasakan pemanfaatan proyek BRDP. Oleh sebab itu, pola petani pioneer ini memberikan efek multiplier yang sangat lambat, mengingat proses produksi dari tanaman ini relatif lama (minimal 4 bulan untuk tanaman pangan). Dengan demikian jelas bahwa sistem pioneer ini tidak dapat menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Melihat kelemahan sistem ini, maka dilakukan *perubahan disain proyek*.

Pada Bulan Agustus 2000 dirumuskan konsep dasar modifikasi disain kegiatan BRDP dengan menerapkan acuan “*Open Menu Option*”, suatu disain kegiatan yang berorientasi pada *demand driven*. Disain BRDP yang demikian ini telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia, dan di setujui oleh Bank Dunia pada bulan November 2000. Diharapkan disain kegiatan BRDP ini lebih sesuai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang penekanan pada kemandirian masyarakat (*self-reliance community*). Wujud dari pandangan ini adalah dibentuknya organisasi pengelola tingkat desa yang menangani pelaksanaan komponen-komponen kegiatan dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, semuanya dikelola secara langsung dari, oleh, dan untuk masyarakat. Setelah satu tahun berjalan, program mengalami perubahan disain, yaitu :

Bagian A : *Village Infrastructure* (Pembangunan Infrastruktur Desa), meliputi proyek investasi infrastruktur pada desa binaan dan penguatan kapasitas tenaga lapangan dan finansial Pemda pada tingkat propinsi dan kabupaten untuk keperluan asistensi kepada desa binaan dalam proses dan implementasi proyek melalui pelaksanaan pelatihan.

Bagian B : *Village-Based Technology Adoption and Related Income-Generating Activities* (Adopsi Teknologi dan Pengembangan Ekonomi Produktif) meliputi proyek investasi pada desa binaan untuk uji teknologi pertanian terseleksi,

penguatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan inisiatif, investasi dan *income generating*; replikasi teknologi sejenis melalui pelaksanaan *grant* desa binaan; penguatan kapasitas petani untuk uji dan implikasi teknologi pertanian terseleksi melalui uji lapangan oleh PPL kerjasama dengan BPTP; hasil pelaksanaan program percontohan pelayanan pemasaran dan pengolahan oleh peminjam serta kerjasama dengan sektor swasta seperti dalam pengadaan dan pemasaran kopi di Kabupaten Kepahyang dengan AEKI (Assosiasi Ekspor Kopi Indonesia), untuk penanaman dan pengolahan karet di Kecamatan Kerkap dengan GAPKINDO, serta pada kecamatan lain yang memiliki prospek komoditas pertanian untuk komoditi selain kopi dan karet pada kecamatan lainnya; penguatan implementasi melalui penguatan kapasitas staf PEMDA melalui pengadaan peralatan kantor, furnitur; dan penguatan kapasitas sekretariat CGC dalam supervisi proyek dan monev melalui pelaksanaan asistensi teknis, pelatihan, serta pengadaan furnitur dan peralatan.

Disain proyek berubah dari sistem petani pioneer ke disain yang baru, yaitu Program Kegiatan Desa (PKD). PKD dikelola dengan pendekatan berdasarkan perencanaan dari bawah dan kebutuhan masyarakat (*bottom up approach and demand driven*), melalui pilihan menu kegiatan desa dengan penggunaan dana maksimum Rp.200 juta per desa yang disalurkan secara bertahap selama proyek berlangsung (*hingga closing date*).

2.2. Gambaran Umum UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa)

Pelaksanaan komponen-komponen kegiatan BRDP di tingkat desa dilakukan oleh suatu organisasi pengelola yang terdiri dari UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa), Tim Verifikasi Desa dan TPSPD (Tim Pelaksana Saran/Prasarana Desa). UPKD bertindak sebagai pengelola keuangan pada tingkat desa, dapat dikatakan sebagai lembaga terdepan dalam pengelolaan kegiatan desa. Tim Verifikasi bertindak sebagai penilai dalam menentukan kegiatan sasaran atau klien. Sementara TP SPD adalah pelaksana bagi kegiatan sarana prasarana. Pengelolaan kegiatan desa sebelumnya (dalam disain awal) terstruktur dalam LKMD. Dibentuknya organisasi

pengelola yang independen dan lepas dari LKMD menunjukkan sifat kemandirian dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Desa (PKD)

Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan dengan suatu asumsi bahwa masyarakat (desa) seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola pembangunan sendiri. Merujuk pada sejarah struktur organisasi kegiatan desa, dari LKMD menjadi UPKD, maka suatu ciri lain yang melekat pada disain pengembangan UPKD adalah upaya desentralisasi pengelolaan kepada masyarakat sehingga PKD diharapkan benar-benar didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan atas pilihan masyarakat sendiri.

Dana PKD disalurkan secara langsung kepada desa sasaran melalui transfer ke rekening unit pengelolaan keuangan desa (UPKD). UPKD akan menyalurkan dana tersebut kepada individu atau kelompok masyarakat sesuai dengan kegiatan dan dana yang telah disetujui. Dana pinjaman kepada masyarakat desa adalah untuk kegiatan adopsi teknologi pertanian dan usaha ekonomi produktif. Dana pinjaman dari UPKD di bawah pengawasan BRDP bersifat dana bergulir dengan tingkat bunga sebesar 18 persen per tahun atau 1,5 persen per bulan (*flat*), dengan ketentuan pengembalian pokok pinjaman dan bunga harus dibayar setiap bulan maksimum selama 12 bulan, umumnya tanpa *grace periode*. Berdasarkan Juklak dan Juknis, bahwa besarnya pinjaman pertama maksimal sebesar Rp.1.500.000/pinjaman. Pemberian pinjaman dana dari UPKD ke nasabah disertai dengan agunan atau pengganti agunan yang setara dan disetujui oleh masyarakat desa setempat. Apabila agunan tidak dapat dipenuhi maka berdasarkan Juklak dan Juknis PKD, ada dua alternatif agunan pengganti yaitu (1) tanggung renteng antara anggota di dalam kelompok masyarakat (pokmas) dan (2) penerapan sistem tabungan beku (tabungan tidak dapat diambil/diblokir sementara).

Pengembalian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan UPKD dan dibukukan oleh pengurus UPKD sesuai dengan tata administrasi yang berlaku. Dana hasil pengembalian ini dapat langsung dipinjamkan kembali kepada calon peminjam lainnya sesuai daftar tunggu yang ada. Angka pengembalian pinjaman dalam satu UPKD harus melebihi atau sama dengan angka 90 persen,

apabila tidak tercapai maka UPKD tidak dapat mengajukan SP2D (surat perintah pencairan dana) berikutnya.

Apabila jumlah maksimum dana PKD telah dimanfaatkan dengan baik dan dinilai berhasil dalam meningkatkan perekonomian desa, dinyatakan dengan surat penghargaan/keputusan oleh Bupati (penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati) maka UPKD dapat mengajukan usulan tambahan dana sebagai bonus yang secara kumulatif tidak melebihi Rp.100 juta per UPKD.

BRDP mengambil kebijakan untuk menyalurkan dana bergulir melalui UPKD secara bertahap, tahapan penyaluran dana ke UPKD ini dimulai dari tahap pertama sampai dengan terserap plafon dana BRDP maksimum sebesar Rp. 200 juta selama proyek. Dana ini sudah termasuk pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp 50 juta (25 persen). UPKD sebagai penanggungjawab keuangan di desa harus memiliki Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kepengurusan lengkap dan ketentuan administrasi lainnya. Pengurus UPKD mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan PKD melalui forum musyawarah desa atau mengumumkannya kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban UPKD disampaikan kepada Pimpro/Pimbagpro kabupaten dan propinsi.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pengelolaan UPKD pasca proyek BRDP
2. Kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD

3.2. Manfaat Penelitian

Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakat desa seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri pembangunan desa tanpa campur tangan pemerintah, dengan kata lain program UPKD harus benar-benar didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas pilihan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa proyek BRDP telah dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2005. Berakhirnya proyek ini membawa konsekuensi logis terhadap pengelolaan seluruh asset yang didanainya. BRDP secara kelembagaan sudah tidak bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas dan asset yang pernah didanainya, termasuk didalamnya adalah keberlanjutan dari UPKD.

UPKD yang telah dilembagakan secara formal selama masa BRDP, pada saat setelah berakhirnya proyek harus dapat tetap bertahan keberadaannya ditengah masyarakat pedesaan. Pemerintah daerah melalui Bapeda Kabupaten, telah memayungi lembaga ini dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengelolaan UPKD, sehingga lembaga ini tetap menjadi satu lembaga yang memiliki kemampuan memberikan pinjaman pendanaan bagi ekonomi produktif di pedesaan pasca BRDP.

Selama masa BRDP, UPKD mendapatkan banyak bantuan dari proyek, baik bantuan modal maupun manajemen. Bantuan ini mengharuskan pengurus dan

kelompok kerja (POKJA) UPKD untuk membuat laporan kondisi UPKD secara kontinu setiap bulan, karena pihak BRDP melakukan monitoring yang ketat dan teratur terhadap keberadaan UPKD. Laporan bulanan ini dapat melihat perkembangan UPKD setiap waktu.

Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro untuk permodalan masyarakat petani khususnya, merupakan subsistem penunjang dalam pengembangan sistem agribisnis secara menyeluruh. Keberadaan UPKD mutlak diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi dan pengembalian kredit anggota serta kesehatan keuangan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Pasca *Bengkulu Regional Development Project* (BRDP) di Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kebijaksanaan dalam mempertahankan keutuhan UPKD sebagai salah satu sumber modal pedesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk membantu usaha ekonomi produktif.

Penelitian ini juga akan memunculkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pengelolaan UPKD dan kontribusi setiap faktor terhadap probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, khususnya UPKD setelah lepas dari masa proyek. Hasil penelitian ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dan penentuan kebijakan yang tepat bagi para pengambil kebijakan dalam mempertahankan eksistensi UPKD yang didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas pilihan masyarakat.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu Kabupaten Bengkulu Utara. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi pemikiran ini, yaitu :

- a. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah desa binaan yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu 108 desa dari total 370 desa binaan BRDP di Propinsi Bengkulu (sekitar 30%).
- b. Berdasarkan penilaian terhadap kelembagaan UPKD yang dilakukan oleh manajemen proyek, maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki paling banyak desa dengan kategori sangat sehat (40 desa) dan juga memiliki paling banyak desa dengan kategori sangat tidak sehat (17 desa).

4.2. Sampling

Desa-desa yang menjadi sampel penelitian adalah :

Tabel 3. Nama Desa-desa Sampel

Strata	Σ Populasi	Σ Sampel	UPKD sampel
UPKD Sangat Sehat	37	1	Kemumu
UPKD Sehat	35	2	Pulau Panggung & Tepi Laut
UPKD Cukup Sehat	6	1	Selolong
UPKD Tidak Sehat	13	1	Tanjung Agung Palik
UPKD Sangat Tidak Sehat	17	1	Air Padang

Sumber: Laporan Tingkat Kesehatan UPKD per Juli 2005, diolah

Jumlah responden untuk setiap UPKD akan dipilih secara acak (*simple random sampling*) dengan jumlah 30 orang per UPKD. Penetapan angka 30 karena

dianggap sebagai jumlah yang memadai dan dalam uji statistik, jumlah responden 30 dan lebih besar 30 tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan. Disamping itu, saat ini juga belum tersedia jumlah populasi anggota UPKD. Dengan demikian, jumlah anggota UPKD sebagai responden dalam penelitian ini adalah 180 orang.

4.3. Metode Analisis Data

Untuk menggambarkan atau menjelaskan probabilitas terjadinya kegagalan pengelolaan UPKD pasca BRDP digunakan analisis probit binary. Analisis Probit Binary (*a binary probit analysis*) adalah suatu analisis yang sering digunakan dalam aplikasi ekonometrika di mana motivasi penggunaannya dimotivasi oleh kerangka variabel laten atau tidak terobservasi. Lebih lanjut, model ini digunakan pada variabel-variabel yang lebih banyak mempunyai dua nilai (*binary* atau variabel dummy), yakni 1 dan 0.

Kecenderungan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD didekati dengan tingkat pengembalian kredit nasabah UPKD. Jika tingkat pengembalian dibawah atau sama dengan 50% ($\leq 50\%$), maka cenderung akan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD dan jika tingkat pengembalian di atas 50% ($>50\%$), maka cenderung akan terjadinya keberhasilan dalam pengelolaan UPKD. Faktor-faktor yang mempengaruhi akan ditentukan berdasarkan atribut-atribut yang melekat pada UPKD yang menjadi objek penelitian ini. Yang dimaksud dengan atribut-atribut UPKD disini adalah faktor-faktor kelembagaan UPKD dan atribut dari anggota UPKD.

Untuk menjelaskan probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD digunakan Analisis Regresi logit. Secara sistematis model persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Li = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \dots + \beta_iX_i + U_i$$

Keterangan :

- L_i = Probabilitas terjadinya kegagalan pengelolaan UPKD
= 1, jika tingkat pengembalian kredit nasabah di bawah atau sama dengan 50% ($\leq 50\%$)
= 0, jika tingkat pengembalian kredit nasabah di atas 50% ($> 50\%$)
- $X_1 - X_i$ = Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pengelolaan UPKD
- β_o = Konstanta
- $\beta_i - \beta_i$ = Koefisien regresi
- i = 1,2,3... i
- U_i = Kesalahan pengganggu

Selanjutnya, fungsi ini akan diuji dengan :

1. Uji F

Digunakan untuk memperlihatkan kemampuan variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan variabel tak bebas pada tingkat kepercayaan 95 %.

$$H_0 : \beta_1, \dots, \beta_i = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien variabel bebas} \neq 0$$

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
2. $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat.

2. Uji t

Uji t pada model ini untuk melihat nyata atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tak bebas dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hipotesis yang diuji :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

$$t_{hit} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana :

β_i : Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

$S\beta_i$: Standar error dari masing-masing variabel bebas

i : 1,2,3,4

Dengan kriteria pengujian :

1. $t_{hit} > t_{tabel}$ atau $-t_{hit} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya secara individu variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
 2. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hit} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya secara individu variabel bebas berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat.
3. Efek Marjinal (Marginal Effect)

Nilai efek marjinal yang akan digunakan dan diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah nilai efek marjinal pada variabel-variabel yang secara parsial berdasarkan uji t berpengaruh secara nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

Untuk mengkaji pengaruh secara bersama-sama variabel-variabel bebas terhadap kegagalan pengelolaan UPKD digunakan uji F. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 variabel, yaitu :

1. Umur (tahun)
2. Pendidikan kepala keluarga (tahun)
3. Jumlah tanggungan keluarga (orang)
4. Konsumsi rumah tangga (Rp per bulan)
5. Pendapatan rumah tangga (Rupiah per bulan)
6. Lama menjadi nasabah (tahun)
7. Jumlah pinjaman (Rp)
8. Persepsi terhadap dana bergulir (skor)
9. Persepsi terhadap pengurus & pelaksanaan kegiatan UPKD (skor)
10. Tingkat Partisipasi dalam pertemuan (skor)
11. Aspek organisasi UPKD (skor)
12. Aspek pengelolaan UPKD (skor)
13. Aspek administrasi Keuangan UPKD (skor)

Analisis regresi linier menghasilkan tabel sidik ragam (*tabel analysis of variance*) seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Analysis of Variance

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F hit</i>	F tabel
Regression	13	9.9504	0.7654	3.6343 **	1.7795
Residual	166	34.9607	0.2106		
Total	179	44.9111			

** : berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%

Sumber : Data primer diolah, 2010

Analisis regresi linier logit menghasilkan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, nilai efek marjinal dan nilai t hitung, seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Nilai Koefisien regresi, Nilai efek marjinal dan Nilai t hitung

<i>Variables</i>	<i>Estimated Coefficients</i>	<i>Marginal Effect</i>	<i>t hit</i>	<i>t tabel</i>
Intercept	11.589	-	2.854**	1.974
Umur	-0.007	-0.002	-0.335	-1.974
Pendidikan kepala keluarga	-0.074	-0.018	-0.889	-1.974
Jumlah tanggungan keluarga	0.088	0.022	0.435	1.974
Konsumsi rumah tangga	0.031	0.008	0.029	1.974
Pendapatan rumah tangga	-0.075	-0.018	-0.772	-1.974
Lama menjadi nasabah	0.329	0.082	2.222 **	1.974
Jumlah pinjaman	0.039	0.009	0.277	1.974
Persepsi terhadap dana bergulir	0.018	0.004	0.363	1.974
Persepsi terhadap pengurus & pelaksanaan kegiatan UPKD	-0.031	-0.008	-1.076	-1.974
Partisipasi dalam pertemuan	-0.032	-0.008	-0.484	-1.974
Aspek organisasi UPKD	-0.053	-0.013	-3.860 **	-1.974
Aspek pengelolaan UPKD	0.004	0.009	0.275	1.974
Aspek administrasi Keuangan UPKD	-0.189	-0.048	-2.439 **	-1.974

** : berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%

Sumber : Data primer diolah, 2010

5.2. Pembahasan

5.2.1. Pengaruh Secara Bersama-sama Variabel Bebas terhadap Probabilitas Kegagalan Pengelolaan UPKD

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD yang ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian nasabah UPKD yang menjadi responden dalam penelitian ini. Apabila tingkat pengembalian $\leq 50\%$ maka diberikan nilai 1 yang menggambarkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD. Apabila tingkat pengembalian $> 50\%$ maka diberikan nilai 0 yang menggambarkan probabilitas keberhasilan dalam pengelolaan UPKD. Untuk itu, sebelum menjelaskan frekuensi terhadap probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD, penelitian ini akan menjelaskan terlebih dahulu tingkat pengembalian nasabah UPKD.

Tingkat pengembalian dana yang bergulir dalam kegiatan UPKD dapat dilihat dari ketepatan masyarakat dalam mengembalikan dana pokok dan ketetapan pembayaran bunga pinjaman.

Tabel 6. Tingkat Pengembalian Dana yang Bergulir pada Kegiatan UPKD.

No	Desa	Tingkat Pengembalian		
		0,6 – 42	43- 86	87 – 129,3
1	Selolong	17	13	0
2	Pulau Panggung	4	21	5
3	Tepi Laut	22	4	4
4	Air Padang	13	14	3
5	Tanjung Agung Palik	4	23	3
6	Kemumu	8	15	7
Jumlah		68	90	22

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat pengembalian anggota terbanyak pada kisaran 43-86 yaitu 90 orang anggota atau 50% dari jumlah anggota yang menjadi responden, selanjutnya dengan kisaran 0,6-42 yaitu 68 orang anggota atau 38% dari jumlah anggota yang menjadi responden, dan kisaran 87-129,3 yaitu 22 orang anggota atau 12% dari jumlah anggota yang menjadi responden. Tinggi rendahnya tingkat pengembalian masyarakat terhadap dana yang bergulir pada setiap kegiatan UPKD ikut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dan kesinambungan dana yang akan bergulir pada kegiatan UPKD berikutnya. Jika tingkat pengembalian masyarakat tergolong tinggi maka cenderung dana yang bergulir pada kegiatan UPKD berikutnya akan relatif tinggi atau besar. Sebaliknya jika tingkat pengembalian masyarakat tergolong rendah, maka cenderung dana yang akan bergulir kecil dan bahkan tidak akan ada dana yang bergulir lagi pada kegiatan UPKD berikutnya.

Dalam analisis regresi dengan pendekatan probabilitas ini, tingkat pengembalian yang menjadi variabel terikat (variabel Y) diberikan kode dengan menggunakan angka 1 (untuk probabilitas kegagalan) dan angka 0 (untuk probabilitas keberhasilan). Dari data yang ada, diperoleh distribusi probabilitas seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Distribusi Probabilitas

No	Desa	Probabilitas		Jumlah
		Kegagalan (1)	Keberhasilan (0)	
1	Selolong	23	7	30
2	Pulau Panggung	9	21	30
3	Tepi Laut	25	5	30
4	Air Padang	17	13	30
5	Tanjung Agung Palik	9	21	30
6	Kemumu	11	19	30
Jumlah		94	85	180

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dengan proporsi / distribusi probabilitas variabel Y (variabel terikat) seperti dijelaskan pada Tabel 7 diatas, diperoleh bahwa secara bersama-sama 13 (tiga belas) variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F seperti disajikan pada Tabel 5, nilai F hitung (3,6343) lebih besar dari nilai F tabel (1,7795).

5.2.2. Pengaruh Parsial Setiap Variabel Bebas terhadap Probabilitas Kegagalan Pengelolaan UPKD

Berdasarkan uji t, dari 13 (tiga belas) variabel bebas yang digunakan, diperoleh jumlah variabel yang berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebanyak 3 (tiga) variabel dan jumlah variabel dinyatakan tidak berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebanyak 10 (sepuluh) variabel. Sepuluh variabel disimpulkan tidak berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan UPKD karena sebelas variabel ini memiliki nilai t hitung yang lebih kecil atau sama dengan t tabel atau nilai - t hitung lebih besar atau sama dengan -t tabel.

5.2.2.1. Variabel-variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap Probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD

1. Umur

Umur merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan atau pun program. Masyarakat yang usianya tergolong muda dan sedang akan cenderung lebih mudah menerima terhadap informasi atau inovasi baru. Menurut Fauzi (2007) faktor umur akan mempengaruhi terhadap keadaan penyerapan motivasi teknologi, dengan umur semakin tua masyarakat akan semakin lambat menerima inovasi baru dan sebaliknya jika masyarakat masih tergolong muda penyerapan teknologi baru akan lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas masyarakat yang menjadi anggota berada pada umur antara 38-54 tahun dengan jumlah 98 orang anggota atau 54% dari

jumlah anggota yang menjadi responden, selanjutnya kisaran umur 22-37 tahun dengan jumlah 70 orang anggota atau 39% dari anggota yang menjadi responden dan kisaran umur 54-70 tahun dengan jumlah 12 orang atau 7% dari anggota yang menjadi responden.

Tabel 8. Umur Anggota yang Menjadi Responden

No	Desa	Umur (Tahun)		
		22 - 37	38 – 54	54-70
1	Selolong	10	18	2
2	Pulau Panggung	17	13	0
3	Tepi Laut	16	14	0
4	Air Padang	10	13	7
5	Tanjung Agung Palik	10	19	1
6	Kemumu	7	21	2
Jumlah		70	98	12

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Kalau dilihat usia, sebagian besar masyarakat masih tergolong usia yang produktif. Menurut Junaidi, A (2007), usia produktif berada pada umur 25-55 tahun. Dimana pada usia tersebut tersebut seseorang mempunyai kemampuan yang baik dalam berpikir dan bertindak untuk merencanakan sesuatu.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang merupakan penguasaan cakrawala, cara berpikir, dan tindakan secara rasional, artinya pendidikan dapat menambah pengetahuan dan keahlian seseorang. Hal tersebut akan menambah kemampuan bersaing yang lebih baik, sehingga akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik lagi dengan semakin tingginya pendidikan. Pendidikan itu sendiri dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal menurut Darasi (1990) adalah pendidikan di sekolah yang diatur secara sistematis mempunyai jenjang dan dibagi

dalam waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sementara pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan diluar sekolah, dimana sistem pendidikan dan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Pendidikan nonformal disini berupa penyuluhan, pelatihan dan magang yang dilaksanakan untuk peningkatan sumber daya manusia peserta proyek (Deptan, 1998).

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Anggota yang Menjadi Responden

No	Desa	Tingkat Pendidikan (Tahun)		
		0 - 6	7 - 9	12 - 17
1	Selolong	18	7	5
2	Pulau Panggung	15	8	7
3	Tepi Laut	3	15	12
4	Air Padang	8	17	5
5	Tanjung Agung Palik	3	6	21
6	Kemumu	5	6	19
Jumlah		52	59	69

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendidikan masyarakat yang menjajdi anggota mayoritas pada kisaran 12-17 tahun yaitu 69 orang atau 38% dari anggota yang menjadi responden setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Kemudian kisaran 7-9 tahun sebanyak 59 orang atau dengan 33% dari anggota yang menjadi responden setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya masyarakat berpendidikan pada kisaran 0-6 tahun sebanyak 52 orang atau dengan 29% dari anggota yang menjadi responden setara dengan Sekolah Dasar.

3. Jumlah Tanggungan

Tanggungan keluarga adalah seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Jumlah tanggungan akan dapat mengakibatkan meningkatnya

kemauan kepala keluarga untuk bekerja lebih baik. sehingga mampu menghasilkan penerimaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Pada Tabel dapat diketahui bahwa responden mempunyai jumlah tanggungan keluarga terbanyak kisaran antara 3-4 orang yaitu 125 responden atau 69% dari jumlah responden, kemudian kisaran 5-6 orang tanggungan yaitu 44 responden atau 24% dari jumlah responden dan kisaran 0-2 orang tanggungan yaitu 11 responden atau 7% dari jumlah responden.

Tabel 10. Jumlah Tanggungan Anggota yang Menjadi Responden

No	Desa	Jumlah Tanggungan (Orang)		
		0 - 2	3 - 4	5- 6
1	Selolong	1	18	11
2	Pulau Panggung	1	22	7
3	Tepi Laut	0	26	4
4	Air Padang	8	14	8
5	Tanjung Agung Palik	1	22	7
6	Kemumu	0	23	7
Jumlah		11	125	44

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dengan demikian responden mempunyai tanggungan yang tergolong relatif sedikit. Umumnya, tanggungan keluarga, termasuk anak-anak dewasa, yang mudah tertarik terhadap ide-ide, inovasi dan informasi baru yang bisa mempengaruhi orang tuanya.

4. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau pun keluarga. Konsumsi biasanya berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang dan papan. Semakin tinggi konsumsi dalam suatu rumah tangga mendorong atau memotivasi keluarga untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat

memenuhinya kebutuhan tersebut. Hal ini akan membuat keluarga berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh UPKD dalam rangka memenuhi konsumsi rumah tangga.

Tabel 11. Konsumsi Rumah Tangga Responden

No	Desa	Konsumsi (Rp/Bulan)		
		234.000-824.000	834.000 – 1.424.000	1.434.000-2.090.000
1	Selolong	25	5	0
2	Pulau Panggung	29	1	0
3	Tepi Laut	30	0	0
4	Air Padang	30	0	0
5	Tanjung Agung Palik	9	20	1
6	Kemumu	18	10	2
Jumlah		141	36,00	3

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel, tingkat konsumsi rumah tangga anggota UPKD yang menjadi responden pada kisaran Rp.234.000-824.000 dengan jumlah 141 orang anggota atau 78% dari jumlah anggota yang menjadi responden, selanjutnya kisaran Rp.834.000-1.424.000 dengan jumlah 36 orang anggota atau 20% dari jumlah anggota yang menjadi responden dan kisaran Rp.1.434.000-2.090.000 dengan jumlah 3 orang anggota atau 2% dari jumlah anggota yang menjadi responden.

5. Pendapatan rumah tangga

Menurut Winardi (1990), pendapatan seseorang adalah hasil yang diterima baik berupa uang maupun material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau

jasa-jasa manusia bebas. Sementara Soekartawi (1995) menyatakan sebagai pendapatan selisih dari penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan.

Tabel 12. Besarnya Pendapatan Anggota UPKD yang Menjadi Responden

No	Desa	Pendapatan (Rp/Bulan)		
		120.000 – 7.110.000	7.120.000 – 14.110.000	14.120.00 – 22.800.000
1	Selolong	30	0	0
2	Pulau Panggung	30	0	0
3	Tepi Laut	30	0	0
4	Air Padang	30	0	0
5	Tanjung Agung Palik	30	0	0
6	Kemumu	25	3	2
Jumlah		175	3	2

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pendapatan masyarakat yang menjadi responden berkisar pada Rp.120.000-7.110.000 dengan jumlah 175 responden atau 97% dari jumlah responden, selanjutnya kisaran Rp.7.120.000-14.110.000 dengan jumlah 3 responden atau 2% dari jumlah responden dan kemudian kisaran Rp.14.120.000-22.800.000 dengan jumlah 2 responden atau 1% dari jumlah responden.

6. Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman atau kredit adalah banyaknya pinjaman yang merupakan kewajiban anggota organisasi atau kelompok untuk melunasinya. Jumlah pinjaman berhubungan dengan besarnya pengembalian beban bunga kredit. Semakin besar jumlah kredit yang harus dibayar, maka semakin besar beban bunga yang harus dilunasi oleh anggota. Hal ini mengakibatkan anggota aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dan pemerintah.

Tabel 13. Jumlah Pinjaman Responden

No	Desa	Jumlah Pinjaman		
		300.000 – 1.800.000	1.900.000 - 3.400.000	3.500.000- 5.000.000
1	Selolong	28	2	0
2	Pulau Panggung	9	12	9
3	Tepi Laut	22	8	0
4	Air Padang	30	0	0
5	Tanjung Agung Palik	14	15	1
6	Kemumu	5	11	14
Jumlah		108	48,00	24,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 13 diketahui bahwa besarnya pinjaman nasabah dengan kisaran Rp.300.000-1.800.000 berjumlah 108 responden atau 60% dari total jumlah responden, selanjutnya kisaran Rp.1.900.000-3.400.000 berjumlah 48 responden atau 27% dari total jumlah responden dan kisaran Rp.3.500.000-5.000.000 berjumlah 24 responden atau 13% dari total jumlah responden. Besar kecilnya pinjaman membuat responden secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian mayoritas responden mempunyai pinjaman yang relatif kecil.

7. Persepsi Terhadap Dana Bergulir

Menurut Thoha (1983) dalam Efendi (2002) persepsi hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan, pandangan, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi masyarakat atau anggota tentang dana yang bergulir merupakan pandangan yang dimiliki oleh anggota atau masyarakat dalam melihat dan memahami manfaat dari dana yang bergulir tersebut.. Persepsi masyarakat atau anggota terhadap dana yang bergulir dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Persepsi Masyarakat Terhadap Dana yang Bergulir

No	Desa	Persepsi Terhadap Dana Bergulir		
		24 - 30 (Buruk)	31 - 37 (Sedang)	38 - 45 (Baik)
1	Selolong	0	11	19
2	Pulau Panggung	2	18	10
3	Tepi Laut	0	2	28
4	Air Padang	0	9	21
5	Tanjung Agung Palik	1	6	23
6	Kemumu	0	1	29
Jumlah		3	47	130

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dari Tabel 14 Dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat atau anggota dengan kisaran 38-45 mempunyai jumlah responden tertinggi yaitu 130 orang atau 72% dari total jumlah responden, kemudian kisaran 31-37 dengan jumlah responden 47 orang atau 26% dari total jumlah responden dan kisaran 24-30 berjumlah 3 responden atau 2% dari total jumlah responden.

8. Persepsi Terhadap Pengurus dan Pelaksanaan Kegiatan UPKD

Persepsi masyarakat atau anggota terhadap pengurus dan pelaksanaan kegiatan UPKD merupakan pandangan yang dimiliki oleh anggota atau masyarakat dalam melihat dan memahami kepengurusan yang terbentuk dan pelaksanaan kegiatan UPKD dalam kelompok atau organisasi tersebut. Persepsi tersebut meliputi penilaian anggota terhadap pengurus, kinerja pengurus dan program apapun yang dilakukan oleh pengurus. Persepsi masyarakat atau anggota terhadap pengurus dan pelaksanaan kegiatan UPKD dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Persepsi Responden Terhadap Pengurus dan Pelaksanaan Kegiatan UPKD

No	Desa	Persepsi terhadap pengurus		
		27 - 36 (Buruk)	37 - 46 (Sedang)	47 - 55 (Baik)
1	Selolong	4	14	12
2	Pulau Panggung	4	11	15
3	Tepi Laut	0	9	21
4	Air Padang	3	14	13
5	Tanjung Agung Palik	4	8	18
6	Kemumu	0	3	27
Jumlah		15	59	106

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dari data yang tersaji pada Tabel 15 diketahui bahwa persepsi masyarakat atau anggota yang menjadi responden dengan kisaran 47-55 yaitu berjumlah 106 responden atau 59% dari total jumlah responden. Selanjutnya kisaran 37-46 yaitu berjumlah 59 responden atau 33% dari total jumlah responden dan kisaran 27-36 berjumlah 15 responden atau 9% dari total jumlah responden.

9. Tingkat Partisipasi Dalam Pertemuan/Rapat

Partisipasi merupakan indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan dari UPKD karena tanpa adanya peran serta atau keikutsertaan dari anggota dalam melaksanakan kegiataannya maka UPKD tersebut tidak akan dapat berjalan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi yang tinggi dari anggota. Peran serta anggota dapat dilihat dari keikutsertaan anggota dalam menyumbangkan pikiran, ide, serta memberikan masukan atau saran kepada UPKD. Salah satu caranya adalah dengan ikut serta dalam pertemuan atau rapat yang diadakan oleh kelompok UPKD.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 16 diketahui bahwa tingkat partisipasi anggota dalam pertemuan tertinggi berkisar antara 7-10 dengan jumlah anggota 81 orang atau 45% dari total jumlah responden, kemudian kisaran 11-15 dengan jumlah

anggota 56 orang atau 31% dari total jumlah responden dan kisaran 3-6 dengan jumlah 43 orang atau 24% dari total jumlah responden. Tinggi rendahnya pertemuan yang dilakukan oleh UPKD dapat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kegiatan yang dilakukan.

Tabel 16. Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Pertemuan

No	Desa	Tingkat partisipasi dalam pertemuan		
		3 - 6 (Rendah)	7- 10 (Sedang)	11 - 15 (Tinggi)
1	Selolong	13	14	3
2	Pulau Panggung	7	13	10
3	Tepi Laut	11	14	5
4	Air Padang	10	14	6
5	Tanjung Agung Palik	2	20	8
6	Kemumu	0	6	24
Jumlah		43	81	56

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan baik apabila terjalinnya kerjasama antar anggota dan pengurus. Apabila tidak terjalin kerjasama antar pengurus dengan anggota maka organisasi atau kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan pertemuan atau rapat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, pengetahuan, wawasan guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, pertemuan juga dapat mencerminkan partisipasi anggota terhadap UPKD. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka semakin tinggi partisipasi dari anggota terhadap UPKD dan sebaliknya semakin sedikit pertemuan maka akan semakin rendah tingkat partisipasi anggota.

10. Aspek Pengelolaan UPKD

Aspek pengelolaan UPKD yang dimaksud adalah pengelolaan terhadap dana dan pinjaman yang dilakukan oleh UPKD. Hasil penilaian terhadap aspek pengelolaan dana dan pinjaman UPKD disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 17 . Hasil Analisis Aspek Pengelolaan Dana dan Pinjaman UPKD

No	Nama UPKD	Indikator Pengelolaan Dana dan Pinjaman
		Persentase
1	Selolong	36.82%
2	Pulau Panggung	40.91%
3	Tepi Laut	48.64%
4	Air Padang	48.64%
5	Tanjung Agung Palik	47.73%
6	Kemumu	46.36%
Rata-Rata		44.85%

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Indikator pengelolaan dana dan pinjaman menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun proposal permohonan pinjaman anggota kepada UPKD dan bagaimana kemampuan UPKD dalam mengelola modal yang ada pada UPKD. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh persentase rata-rata sebesar 44,85 persen yang berarti rendah dan hal ini menunjukkan bahwa setelah proyek BRDP selesai, pengelolaan dana dan pinjaman mengalami penurunan, karena pada saat proyek BRDP berlangsung UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata mempunyai persentase lebih dari 90 persen, karena apabila tidak mencapai angka tersebut UPKD tidak akan mendapatkan tambahan modal yang mencapai angka maksimal sebesar 200 juta rupiah. Akan tetapi setelah UPKD berakhir banyak UPKD yang tidak lagi mampu mengelola keuangan UPKD, masalah yang biasanya dihadapi oleh pengurus UPKD adalah adanya pemahaman yang keliru oleh masyarakat atau nasabah UPKD yang berkeyakinan bahwa dana yang berasal dari BRDP adalah hibah atau hadiah yang tidak akan dikembalikan oleh UPKD kepada BRDP lagi. Sehingga,

ada sebagian masyarakat yang tidak membayar pinjaman UPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan dan akibatnya modal UPKD tidak bertambah bahkan berkurang.

5.2.2.2. Variabel-variabel yang berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD

1. Lama Menjadi Nasabah

Lamanya petani menjadi anggota atau nasabah dapat menambah wawasan dan pengalaman. Secara umum, semakin lama anggota menjadi nasabah maka akan semakin luas wawasan dan pengalaman yang dimiliki sehingga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengembalian yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya peluang keberhasilan dalam pengelolaan UPKD.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai t hitung = 2.222 dan nilai t tabel = 1.974 (Tabel 5). Ini berarti nilai t hitung > t tabel, yang berarti menolak hipotesis H_0 dan menerima hipotesis H_a pada taraf kepercayaan 95%, sehingga lama menjadi nasabah berpengaruh nyata positif terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD. Data tentang lamanya responden menjadi nasabah UPKD disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Lamanya Responden Menjadi Nasabah

No	Desa	Lama Menjadi Nasabah (Tahun)		
		1 - 2,4	2,5 – 4,9	5 - 7
1	Selolong	2	26	2
2	Pulau Panggung	4	18	8
3	Tepi Laut	4	20	6
4	Air Padang	30	0	0
5	Tanjung Agung Palik	1	18	11
6	Kemumu	2	13	15
Jumlah		43	95	42

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Dari Tabel 18 diketahui bahwa lama responden menjadi nasabah antara kisaran 2,5-4,9 tahun dengan jumlah 95 responden atau 53% dari jumlah responden, selanjutnya kisaran 1-2,4 tahun dengan jumlah 43 orang atau 24% dari jumlah responden dan kisaran 5-7 tahun dengan jumlah 42 orang atau 23% dari jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah sudah relatif lama, dan secara umum nasabah sudah menjadi anggota UPKD lebih dari dua tahun.

Hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai efek marginal dari variabel lamanya menjadi nasabah ini sebesar 0.082. Nilai efek marginal yang positif ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan lamanya responden menjadi nasabah UPKD selama satu tahun maka akan meningkatkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD sebesar 0.082 dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya konstan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, nasabah yang telah lama menjadi anggota UPKD dan diberikan pinjaman maka akan semakin besar pula kontribusi nasabah tersebut terhadap probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD. Hal ini berarti dengan semakin sering dan semakin lamanya nya interaksi antara nasabah dengan UPKD justru semakin memperkuat adanya pemahaman yang keliru oleh masyarakat atau nasabah UPKD yang berkeyakinan bahwa dana yang berasal dari BRDP adalah hibah atau hadiah yang tidak akan dikembalikan oleh UPKD kepada BRDP lagi. Sehingga, umumnya masyarakat yang telah lama menjadi nasabah cenderung untuk tidak membayar pinjaman UPKD sesuai jumlah pengembalian dan jadwal yang telah ditentukan.

2. Aspek Organisasi UPKD

Aspek organisasi UPKD yang dimaksud adalah pengetahuan pengurus dalam menjalankan organisasi UPKD seperti menentukan perangkat organisasi UPKD, kesesuaian fungsi yang dijalankan oleh pengurus dan kelengkapan organisasi lainnya. Hasil analisis aspek organisasi UPKD seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 19 . Hasil Analisis Aspek Organisasi UPKD

No	Nama UPKD	Indikator Organisasi
		Persentase
1	Selolong	50.91%
2	Pulau Panggung	73.64%
3	Tepi Laut	57.27%
4	Air Padang	63.64%
5	Tanjung Agung Palik	63.64%
6	Kemumu	63.64%
Rata-Rata		62.12%

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Pada indikator organisasi dapat dijelaskan bahwa setelah BRDP rata-rata indikator organisasi 62,12 persen angka ini cukup tinggi. Menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BRDP cukup berhasil. UPKD Bina Usaha di Desa Pulau Panggung mendapatkan persentase tertinggi yaitu 73,64 persen yang berarti bahwa pengetahuan pengurus dalam menjalankan organisasi UPKD seperti menentukan perangkat organisasi UPKD, kesesuaian fungsi yang dijalankan oleh pengurus dan kelengkapan organisasi lainnya dipahami oleh pengurus UPKD tersebut walaupun sudah tidak ada lagi pendampingan seperti saat proyek BRDP berlangsung.

Variabel aspek organisasi UPKD ini memiliki nilai -t hitung sebesar -3.860 dan nilai -t tabel sebesar -1.974. Ini berarti nilai -t hitung < -t tabel sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga aspek organisasi UPKD berpengaruh nyata negatif terhadap probabilitas pengelolaan UPKD.

Nilai efek marginal dari variabel aspek organisasi UPKD ini sebesar -0.013, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek organisasi sebesar satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.013. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruk aspek organisasi UPKD maka akan semakin meningkat probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD atau sebaliknya, semakin baik aspek organisasi UPKD maka akan semakin menurunkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD.

3. Aspek Administrasi Keuangan UPKD

Penilaian terhadap aspek administrasi UPKD dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas keuangan UPKD yang bersifat administratif. Penilaian ini mengukur konsistensi pengurus UPKD menerapkan ketentuan administrasi yang didapatkan pada saat proyek BRDP masih berlangsung seperti pencatatan kas dan pinjaman yang dikeluarkan oleh UPKD. Hasil penilaian terhadap aspek administrasi keuangan UPKD disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 20 . Hasil Analisis Aspek Administrasi Keuangan UPKD

No	Nama UPKD	Indikator Administrasi Keuangan
		Persentase
1	Selolong	86.67%
2	Pulau Panggung	73.33%
3	Tepi Laut	60.00%
4	Air Padang	60.00%
5	Tanjung Agung Palik	93.33%
6	Kemumu	80.00%
Rata-Rata		75.56%

Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Indikator administrasi keuangan masih mempunyai persentase yang tinggi yaitu 75,56 persen walaupun BRDP telah selesai. Hal ini berarti bahwa pengurus UPKD masih menerapkan ketentuan administrasi yang mereka dapatkan pada saat proyek BRDP masih berlangsung seperti pencatatan kas dan pinjaman yang dikeluarkan oleh UPKD.

Variabel aspek administrasi keuangan UPKD ini memiliki nilai -t hitung sebesar -2.439 dan nilai -t tabel sebesar -1.974. Ini berarti nilai -t hitung < -t tabel sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga aspek administrasi keuangan UPKD berpengaruh nyata negatif terhadap probabilitas pengelolaan UPKD.

Nilai efek marginal dari variabel aspek organisasi UPKD ini sebesar -0.047, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek administrasi keuangan UPKD sebesar

satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.047. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruk aspek administrasi keuangan UPKD maka akan semakin meningkat probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD atau sebaliknya, semakin baik aspek administrasi keuangan UPKD maka akan semakin menurunkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh aspek administrasi keuangan UPKD lebih besar dari pengaruh aspek organisasi UPKD terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Secara bersama-sama, 13 (tiga belas) variabel bebas yang terdiri dari umur, pendidikan kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan rumah tangga, lama menjadi nasabah, jumlah pinjaman, persepsi terhadap dana bergulir, persepsi terhadap pengurus dan pelaksanaan kegiatan UPKD, tingkat partisipasi dalam pertemuan, aspek organisasi UPKD, aspek pengelolaan UPKD dan aspek administrasi UPKD berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD. Secara parsial, hanya ada tiga variabel yang berpengaruh nyata terhadap probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD, yaitu lama menjadi nasabah, aspek organisasi UPKD dan aspek administrasi keuangan UPKD.
2. Variabel lama menjadi nasabah berpengaruh nyata positif dengan nilai efek marginal sebesar 0.082, berarti setiap peningkatan lamanya responden menjadi nasabah UPKD selama satu tahun maka akan meningkatkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD sebesar 0.082, variabel aspek organisasi UPKD berpengaruh nyata negatif dengan nilai efek marginal sebesar -0.013, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek organisasi sebesar satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.013, dan variabel aspek administrasi keuangan berpengaruh nyata negatif dengan nilai efek marginal sebesar -0.047, yang berarti setiap peningkatan penilaian aspek administrasi keuangan UPKD sebesar satu satuan maka akan menurunkan probabilitas kegagalan pengelolaan UPKD sebesar 0.047.

6.2. Saran

Ada dua hal utama yang dapat disarankan sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, yaitu :

1. Dalam melakukan peminjaman dan perguliran dana ekonomi produktif, UPKD dapat memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah memperoleh pinjaman atau masyarakat yang belum lama menjadi nasabah UPKD. Dengan prioritas ini, pengelola UPKD dapat melakukan pendampingan secara intensif terhadap nasabah dalam melakukan pengembalian sehingga probabilitas keberhasilan dalam pengelolaan UPKD meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan dapat selalu menyediakan fasilitator bagi UPKD, yang akan berfungsi seperti fasilitator semasa proyek BRDP. Fasilitator akan melakukan pendampingan terhadap UPKD dan nasabah. Pendampingan terhadap UPKD dan nasabah diharapkan dapat meningkatkan perbaikan terhadap aspek organisasi dan aspek administrasi keuangan UPKD sehingga menurunkan probabilitas kegagalan dalam pengelolaan UPKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2002. *Buku Kerja Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* Bengkulu Utara.
- Augusta, I. 2000. *Asumsi-asumsi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia*. Mimbar SOSEK 13 (1) :19 – 28 April 2000.
- _____.2003. *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan (Evaluation Methods on Empowerment Programe)*. Mimbar SOSEK 16 (1): 93 – 116, April 2003.
- Bappeda Propinsi Bengkulu & LSM Teraju, 2003. *Studi Evaluasi dan Pengembangan BRDP Propinsi Bengkulu*. Bengkulu
- Bappeda Propinsi Bengkulu & P3KPK, 2003. *Studi Beneficiary Survei Desa Tahap III BRDP*. BRDP Propinsi Bengkulu. Bengkulu
- Bina Swadaya, 2005. *Program Kegiatan Desa UPKD Propinsi Bengkulu*. BRDP Propinsi Bengkulu. Bengkulu
- Judge, G.G., W.E. griffits, RC. Hill, H. Lutkepohl dan T.c. Lee. 1985. *The Theory and Practice of Econometrics*. 2nd edition. John Willey. New York.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-5. Ghalia Indonesia.. Jakarta
- Nusril *et al.* 2003.*Studi Evaluasi Pelaksanaan dan Kelembagaan Pelaksana Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP)*. AGRISEP Vol. 3 No. 2, Maret 2005 : 114 – 126
- O'Donnell. C.J.; A. Smith dan J. Modison. 1999. *Using Individual Attributes to Explin Variations in The Incidence of Violence Aginst Women*. Draft. The University of New England. Armidale. NSW.
- Salandro, D. dan W.B. Harrison. 1997. Determinants of the Demand for home equity credit lines. *The Journal of Consumer Affairs*. 31(2): 326-345.
- Singarimbun, M dan Sofian E.1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta.
- Sumodinigrat, G.1999. *Penanggulangan Krisis Harus Memihak Rakyat*. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan 16 Juni/Juli 1999. BAPPENAS. Jakarta.
- Sukiyono, K Musriyadi Nabiu, 2004. *Metode Monitoring dan Evaluasi : Diskusi*. Jurnal Agrisep 2 (2) : 157 – 163, Maret 2004.
- Wahyuni, S.E, Nuraini P, dan Yuliaty R.2003. *Kajian Tentang Program-Program Pelayanan Lanjut Usia di Pedesaan di Indonesia*. Mimbar SOSEK 16 (1) : 1 – 20, April 2003 .
- Yuliarso,M.Z dan Indra C.2003. *Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan terhadap Kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP)*. Jurnal Agrisep 1 (2), : 137 – 143, Maret 2003.